



Anggota VI BPK RI Beri Pengarahan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah di Badung

★ Bahrullah Akbar: Kepala Daerah Harus Punya Komitmen Kuat Dorong Tata Kelola Keuangan

MANGUPURA, NusaBali

Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar memberikan pengarahan terkait peningkatan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Badung, Kamis (23/4) kemarin. Kehadiran Anggota VI BPK RI bersama Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii serta didampingi dua orang Tenaga Ahli VI BPK RI yakni Achmad Djazuli dan Aditya Wicaksana ini, disambut Bupati Badung A.A. Gde Agung, Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta, Wabup I Made Sudiana dan Sekda Badung Kompyang R. Swandika di Puspem Badung. Hadir pula Kepala Auditor VI BPK RI, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syfa, Pimpinan DPRD Badung, Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Badung serta SKPD di lingkungan Pemkab Badung.

Dalam pengarahannya, Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar memaparkan tentang pentingnya akrual basis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sehingga arah dan manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel membutuhkan sebuah komitmen kuat dari kepala daerah/bupati untuk dapat merubah pola pikir dan mendorong jajaran SKPD khususnya pengelola keuangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

"Tujuan kami turun ke kabupaten ini untuk menyamakan persepsi mengenai akrual basis. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah bersama Dewan dan yang terpenting adalah komitmen kuat dari kepala daerah untuk mendorong pelaksanaan



BUPATI Gde Agung bersama Wabup Sudiana, Ketua DPRD Nyoman Giri Prasta, Wakil Ketua DPRD I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta dan Sekkab Kompyang R. Swandika disaat menerima Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor VI BPK RI dan Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Bali, Kamis (23/4) kemarin di Puspem Badung Mangupura Mandala.

tata kelola keuangan daerah yang baik. Harapan kami mampu merubah pola pikir terutama di level petugas pengelola keuangan agar dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," terangnya.

Dibagian lainnya, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii memaparkan terkait Akuntabilitas Desa. Hal ini terkait alokasi dana dari pusat untuk desa mulai 2015. Untuk itu, kepala desa diminta agar berhati-hati memanfaatkan dana tersebut, karena masih banyak kepala desa yang belum memahami tentang dana desa tersebut. Guna memberi pemahaman kepada Kepala Desa, pihaknya telah menerbitkan buku khusus mengenai tata kelola keuangan desa yang memuat secara teknis pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, Bupati Gde Agung menyambut baik kehadiran anggota VI

BPK RI untuk memberikan pengarahan terkait tata kelola keuangan daerah. Bupati mengakui, di Badung mulai tahun 2015 ini telah menggunakan sistem akrual basis, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang lebih baik dari sebelumnya. "Di Pemerintahan Kabupaten Badung baik eksekutif maupun legislatif, sejak awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara lain: proses perencanaan APBD sudah tepat waktu dalam penetapan APBD, dalam penyusunan anggaran sudah berdasarkan standar satuan harga dan Analisis Standar Belanja (ASB), dari aspek pengadaan barang dan jasa, kami telah menerapkan e-procurement yang ditunjang dengan keberadaan ULP dan LPSE," jelas Bupati. @

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 2



Pusat Sepakati Terminal Barang Gilimanuk

NEGARA, NusaBali

Pembangunan terminal barang menggunakan tanah seluas 3,5 hektare di selatan Gelung Kori Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, tinggal menunggu realisasi. Pasalnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, telah menyetujui pembangunan terminal senilai Rp 45 miliar itu.

Kepala Dinas Hubkominfo Jembrana, Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, mengakui jika pembangunan terminal barang di Gilimanuk tinggal menunggu realisasi. Rencana pembangunan itu terungkap dari hasil Pra Musrebang Nasional yang diikutinya di kantor Bapenas, Jakarta, Rabu (22/4). "Pembangunan terminal barang itu sudah dipastikan terealisasi. Anggarannya sesuai dengan RAB dari DED yang telah kita buat yakni Rp 45 miliar," terang Putra Riyadi, Kamis (23/4).

Diyakini, pembangunan terminal barang itu akan dimulai awal tahun 2016 nanti. Menurutnya, kepastian realisasi, karena sudah tidak ada kendala permasalahan syarat "Seperti study kelayakan dan DED sudah kita persiapkan diawal. Kemarin juga sudah kita serahkan itu semua, sekaligus sertifikat tanah seluas 3,5 hektare milik kita ke pusat," ujarnya.

Diakui sebelumnya sempat terbentur mengenai rencana pembangunan jalan langsung yang akan menyambung antara Jembatan Timbang (JT) dengan terminal barang tersebut. Sebab untuk membangun jalan itu dibutuhkan lahan dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB), sehingga harus dikoordinasikan ke Kementerian Kehutanan. Dimana pengusulan pembuatan terminal barang itu sempat ditolak.

"Setelah kita koordinasikan lagi, hanya miss saja. Jadi kita bukan mau

mengeksplore tanahnya itu buat memperluas terminalnya, hanya jalan saja. Kemudian masalah jalan itu, akan masuk dengan penataan yang dilakukan melalui Pariwisata. Jadi kalau ditata membuat jalan untuk Pariwisata, diperbolehkan, dan sekarang sudah tidak ada masalah lagi," jelasnya.

Rencana pembangunan terminal barang untuk menunjang aktivitas di jembatan timbang (JT) yang sudah ada di utaranya. Selama ini, JT tidak memiliki tempat khusus untuk menurunkan barang-barang dari truk kelebihan muatan yang biasa masuk dari Jawa. "Satu lagi sebenarnya kita lihat, Pusat memang juga ingin segera membangun terminal barang itu, karena JT di awal tahun 2017 nanti, juga akan diambil alih langsung dari Pusat. Makanya sekarang Pusat, fokus melakukan pembangunan untuk kesiapan pengambilalihan itu," tukas Bagus Putra Riyadi. od

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 17



Satu Kardus Dokumen Disita Kejari

★ Dari Sekwan Denpasar, Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

Dokumen yang disita tim penyidik Kejari ini terkait hasil audit Wilayah Bali dan dokumen lainnya terkait perjalanan dinas.

DENPASAR, NusaBali

Setelah getol mengobok-obok Pemkab Badung dalam dugaan korupsi Tirta Yatra ke India dan Gunung Salak, kini penyidik Kejari Denpasar mulai fokus menangani kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Pemkot Denpasar. Bahkan pada, Kamis (23/4) sekitar pukul 09.00 Wita, penyidik kembali menyita satu kardus dokumen dari Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir yang ditemui pada, Kamis (23/4) mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen terkait dugaan korupsi perjalanan dinas di Pemkot Denpasar. "Sekarang kami fokus dulu di kasus di Pemkot Denpasar. Untuk di Pemkab Badung kami kami lanjutkan setelah yang di Denpasar selesai," ujar Syahrir.

Setelah sebelumnya menyita empat kardus dokumen dari Bagian Hukum Pemkot Denpasar, penyidik kembali menyita satu kardus dokumen perjalanan dinas dari Sekretariat DPRD Kota

Denpasar. Dokumen ini sendiri terkait hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali dan dokumen lainnya terkait perjalanan dinas. "Hasil audit BPKP ini yang berisi temuan di perjalanan dinas tahun 2013," jelasnya.

Dijelaskannya, dalam kasus ini pihaknya masih meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

"Masih ada dua kardus dokumen perjalanan dinas yang belum diserahkan Sekwan. Kami masih menunggu itu," jelasnya. Nah, dari temuan BPKP sebesar Rp 500 juta terkait perjalanan dinas yang tidak wajar ini memang sudah dikembalikan semuanya. Yang paling banyak mengembalikan, yaitu

Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mencapai Rp 250 juta.

"Sisanya dikembalikan SKPD lainnya di Pemkot Denpasar. Makanya sekarang kami fokuskan dulu di Sekwan Denpasar," beber Syahrir. Ia mengatakan pihaknya akan fokus di perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pasalnya ada beberapa perjalanan dinas yang diduga menyimpang. Bahkan ada perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran hingga Rp 500 juta.

"Contohnya ada perjalanan Bintek ke Jakarta yang diikuti 45 anggota dewan dan 8 staf Sekwan yang menghabiskan anggaran Rp 500 juta," jelasnya. Sementara saat dikonfirmasi terkait penyitaan dokumen di Sekretariat DPRD Denpasar, Sekretaris DPRD Denpasar IGN Rai Suta mengaku tidak mengetahui adanya penyitaan dokumen tersebut. "Tidak ada, tidak ada penyitaan," ujarnya singkat saat dihubungi via telepon semalam. rez

DATA FAKTA DUGAAN KORUPSI PERJALANAN DINAS

- Penyitaan dokumen: 4 kardus dari Bagian Hukum Pemkot dan 1 kardus dari Sekretariat DPRD Denpasar.
- Dokumen yang disita terkait soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan dokumen ini berdasarkan temuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.
- Kejari akan fokus di perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013, sebab ada beberapa perjalanan dinas yang diduga menyimpang. Bahkan ada perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran hingga Rp 500 juta.

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 5



Tak Ingin Simantri Jadi Bulan-bulanan

"Saya minta pada Kadis Pertanian dan jajarannya agar benar-benar Simantri dievaluasi dengan jujur, jangan juga mau dibohongi oleh kelompok penerima Simantri"



Made Mangku Pastika

• DOK NUSABALI

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tidak ingin jika program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) menjadi bulan-bulanan dan dibohongi oleh oknum pendampingnya.

"Jangan dengar 100 persen apa yang dikatakan pendamping Simantri. Pecat saja para pendamping yang menyampaikan laporan bohong-bohong," kata Pastika saat memimpin rapat evaluasi program pembangunan Pemprov Bali triwulan I/2015, di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (23/4).

Menurut dia, bagi Simantri yang keberadaannya masih kurang dari harapan, harus secepatnya dilakukan langkah perbaikan. "Saya minta pada Kadis Pertanian dan jajarannya agar benar-benar Simantri dievaluasi dengan jujur, jangan juga mau dibohongi oleh kelompok penerima Simantri," ucap Pastika.

Dia mencontohkan, modus kebohongan yang kerap dilakukan kelompok Simantri seperti ketika dilakukan pengecekan, semua sapi dan peralatan pengolahan pupuk lengkap. Namun, ketika pemeriksa pergi, semua sapinya juga menghilang dari unit Simantri itu. "Seharusnya kita bisa tahu bohong atau tidak karena di situ ada pendamping Simantri. Tetapi masalahnya, pendamping Simantri juga ada yang bohong," kata Pastika.

Untuk saat ini, ujar dia, Simantri masih menjadi alternatif upaya untuk meningkatkan nilai tambah petani yang harus diteruskan. Tetapi dia minta diyakinkan agar 50 unit Simantri yang akan mendapatkan bantuan tahun ini tidak boleh gagal.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Adnyana mengemukakan beberapa penyimpangan pelaksanaan Simantri. Saat turun ke berbagai

daerah di Kabupaten Bangli, setidaknya dia menemukan empat gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah menerima dana program Simantri pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata sapi bantuan dari Provinsi Bali sudah tidak ada lagi di tempat unit Simantri tersebut.

Bahkan legislator dari Kabupaten Bangli itu berani menyatakan untuk di kabupaten asalnya saja sekitar 70 persen unit

Simantri melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ada. "Program simantri lebih efektif kalau diberikan kepada kelompok yang tinggalnya dalam satu dusun berdekatan. Memang Simantri itu program ideal untuk menyejahterakan petani, tetapi kenyataannya begitu masih banyak penyimpangan. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi yang

serius agar tidak merembet pada kelompok tani yang lainnya," ucap Adnyana.

Program Simantri telah diluncurkan Pemprov Bali sejak 2009 dan hingga saat ini sudah terbentuk 502 unit Simantri. Setiap gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima program Simantri mendapatkan dana hibah awalnya Rp200 juta dan mulai 2014 meningkat menjadi Rp225 juta dari Pemprov Bali. **ant**

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 3